

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Kesimpulan mengenai pengaruh desentralisasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2016 s.d. 2021 sebagai berikut:

1. Desentralisasi fiskal dengan indikator penerimaan (RI), indikator pengeluaran (EI) dan indikator otonomi (AI) tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat. Alokasi APBD kabupaten/kota di Sumatera Barat yang masih didominasi oleh belanja pegawai sehingga kurangnya alokasi pada sektor-sektor produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi.
2. Desentralisasi fiskal dengan indikator penerimaan (RI), indikator pengeluaran (EI) dan indikator otonomi (AI) berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumatera Barat. Alokasi APBD kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan fungsinya sudah mengutamakan sektor pendidikan dan Kesehatan sehingga mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
3. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumatera Barat. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Provinsi Sumatera berasal dari sektor-sektor yang juga mendorong masyarakat dalam peningkatan taraf hidupnya.
4. Variabel lainnya dalam model yaitu variabel investasi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Angka kemiskinan memiliki pengaruh signifikan dan hubungan negatif dengan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumatera Barat.

6.2.Saran

Merujuk pada hasil studi dan ikhtisar yang telah dikemukakan, terdapat beberapa gagasan yang dapat dimunculkan antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

- a. Pemerintah daerah dapat melakukan kebijakan yang meningkatkan alokasi belanja modal yang tepat guna dan tepat sasaran dibandingkan belanja pegawai dan belanja barang jasa sehingga dapat mendorong keberhasilan pelaksanaan pengelolaan fiskal yang terdesentralisasi dalam meningkatkan produktifitas perekonomian dan taraf hidup penduduk di Sumatera Barat.
- b. Pemerintah daerah sebaiknya meningkatkan kemandirian keuangan daerah, dengan meningkatkan penerimaan daerah melalui pendapatan asli daerah dengan memaksimalkan pengelolaan sektor-sektor potensial daerah di wilayah Prov. Sumatera Barat.
- c. Pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan peningkatan alokasi belanja fungsi pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas modal manusia untuk bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Provinsi Sumatera Barat.
- d. Kemudian kebijakan lain yang tidak kalah penting yaitu peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran pemerintah baik pusat ataupun daerah dengan lebih efektif dan efisien.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Untuk dapat menggabungkan indikator sosial ekonomi dan politik. Indikator sosial dapat menggunakan indeks kemiskinan dan indeks pelayanan publik, sedangkan indikator ekonomi dapat menggunakan pertumbuhan APBD dan PDB per kapita. Misalnya, indikator politik dapat menggunakan tingkat partisipasi politik masyarakat dan indeks persepsi korupsi (IPK). Kemudian hal ini juga dapat diteliti dengan

menggunakan peristiwa-peristiwa nasional dan internasional tertentu, seperti pemilihan umum dan krisis keuangan global.

